

PLURALISME DI KABUPATEN JAYAPURA SEBAGAI SKETSA PEMIKIRAN MEMBANGUN BHINEKA TUNGGAL IKA MENUJU INDONESIA DAMAI

*Pluralism in Jayapura Regency as a Sketch of Thoughts on Building Unity in
Diversity towards a Peaceful Indonesia*

Yane Rosmawati Maahury

Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri-Sentani

maahuryyane@yahoo.co.id

Naskah diterima: 30 Oktober 2022 direvisi: 22 November 2022; disetujui: 30 November 2022

Abstrak: Kemajemukan menjadi suatu kekayaan nasional bangsa Indonesia. Kemajemukan agama, suku bangsa-etnis, bahasa dan kebudayaan masyarakat Indonesia mempunyai nilai kehidupan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akan tetapi dekade ini kemajemukan bangsa ini telah menciptakan disintegrasi kehidupan anak-anak bangsa. Banyak konflik terjadi karena perbedaan agama, suku bangsa-etnis, bahasa dan kebudayaan. Konflik tersebut yang harus dituntaskan supaya tidak berdampak kepada perpecahan. Tujuan Penelitian ini adalah memberikan gambaran pluralisme yang terjadi di Kabupaten Jayapura serta teknik penanaman sikap secara kognitif kepada masyarakat untuk melaksanakan nilai-nilai pluralisme yang berhasil membawa Kabupaten Jayapura menjadi tanah yang damai sesuai dengan motto dan filosofi hidupnya. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara terfokus. Analisis data menerapkan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa membangun kehidupan plural yang damai adalah menciptakan cara berpikir (*mindset*) positif mengenai pluralisme, memberikan pendidikan karakter yang benar untuk anak-anak bangsa yang berlangsung terus-menerus, melakukan pengawasan bersama melalui pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

Kata Kunci: Kabupaten Jayapura, Pluralisme, Sikap, Toleran

Abstract: Pluralism becomes a national wealth of the Indonesian Nation. The plurality of religions, ethnicities, languages, and cultures of the Indonesian people have the same values of life, rights and obligations in the law of the Republic of Indonesia, but in this decade the plurality of this nation has created the disintegration among the people of Indonesia. Many conflicts occur because of differences in religion, ethnicity, language, and culture. The conflict must be resolved so that it does not give impact on division. The purpose of this study is to provide an overview of pluralism that occurs in Jayapura Regency. This study also gives techniques to embed the cognitive attitude to the community in implementing pluralism values in Jayapura regency, and succeeding to be a peaceful land in accordance with its motto and philosophy of life. This research applied qualitative method. Data were obtained by observation and focused interviews. Data analysis applied reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study show that building a peaceful plurality create a positive mindset, providing true character education for the children continuously, conducting supervision through formal education and non-formal education.

Keywords: Jayapura Regency, Pluralism, Attitude, Tolerant

PENDAHULUAN

Pluralisme atau kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan identitas, prinsip dasar bangsa baik itu

kemajemukan agama, suku bangsa-etnis, adat-istiadat, bahasa dan kebudayaan. Pluralisme adalah suatu keadaan menjadi plural, atau suatu

paham tentang beragama. Jadi pluralisme adalah suatu keadaan sosial yang beragama. Pluralisme adalah perbedaan dimana dituntut suatu sikap untuk saling menghargai, bekerjasama untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama (Masykur, 2016).

faktor penyebab terjadinya pluralisme adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang menjelaskan tentang adanya keabsolutan tentang beragama. Beragama mempunyai keyakinan masing-masing sehingga tidak bisa dipaksakan satu agama untuk semua. Berdasar dari situ maka pluralisme khususnya pluralisme agama muncul. Sedangkan faktor eksternal beranjak dari istilah leberalisme dimana liberalisme awalnya mengurus bidang politik namun kemudian berkembang kepada urusan agama dan sosial (Dzakie, 2014).

Pluralisme atau kemajemukan adalah fakta kehidupan masyarakat Indonesia yang dibangun dengan dasar Bhineka Tunggal Ika (*unity and diversity*) sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan kekayaan bangsa dan harus dipertahankan (Harefa & Fatolosa Hulu, 2020). Akan tetapi decade ini banyak terjadi konflik pluralism terjadi di luar tanah Papua dengan adanya dominasi agama, suku bangsa, etnis yang satu terhadap lainnya. Banyak konflik terjadi yang mengatas namakan agama, suku bangsa-etnis yang berupa kasus-kasus rasisme yang setiap waktu dapat menciptakan disintergrasi bangsa Indonesia.

Pluralisme seharusnya disikapi sebagai kancas atau gelanggang yang benar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang buruk dan bukan untuk monopoli yang benar saja atau monopoli yang buruk saja. Kebenaran tidak hanya dimiliki oleh satu agama tertentu saja dan keburukan dari pada

agama lain. Akhirnya melahirkan diskriminasi yang mengklaim kebenaran ada pada agama tertentu saja dan keburukan adadalam agama lain. Hal ini senada dengan (Arifianto et al., 2021) bahwa pemicu konflik berskala agama adalah adanya penafsiran sentrisme agama. Pengaruh pikiran yang destruktif seperti ini hakikatnya mendatangkan ancaman dalam kemajemukan bangsa yang menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika. Kasus-kasus penghinaan agama, pembakaran gereja, adanya radikalisme, rasisme dimana-mana terutama di luar tanah Papua adalah contoh perpecahan persatuan dan kesatuan NKRI.

Sikap emosional apalagi reaktif tidak akan mampu memandang perbedaan dengan lebih hormat, santun, dan toleran. Prinsip dasar Bhineka Tunggal Ika yang telah diwujudkan dalam kemajemukan kehidupan di tanah Papua adalah perwujudan Papua menuju tanah damai (*land of peace*) untuk kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu prinsip kemajemukan di atas berusaha membetulkan sebuah perspektif yang salah dan terkesan direkayasa atas nama kemajemukan yang sarat dengan politisasi dan ideologisasi agama. Kemudian menggantikan cara pandang kemajemukan yang bertolak pada cara pandang yang hormat, santun, toleran, kritis dan manusiawi. Namun hal yang bertolak belaskan dengan itu, pluralisme menampilkan diskriminasi dan tindakan rasisme yang terjadi pada bangsa Indonesia, sebagai fakta beberap tindakan agresif intoleransi beragama yang memaksa diterbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan tugas aparat pemerintah dalam menjamin ketertiban dan

kelancaran pelaksanaan pembangunan dan ibadah oleh pemeluk-pemeluknya.

Catatan peristiwa yang bersifat aktual akan memberikan gambaran bahwa sikap terhadap pluralism tidak sebatas pada tingkat pengetahuan saja namun harus disertai dengan tindakan aktuliasasi nyata. (Kabanga & Paramma, 2021) berpendapat bahwa cara menyikapi sesuatu, termasuk kamajemukan, harus melalui proses tatanan memahami, merasakan, dan mengaktualisasikan secara nyata. Munculnya kekerasan terhadap berbagai suku etnis khususnya etnis Papua yang melibatkan berbagai pihak didalamnya adalah belum nyatanya proses jaminan perlindungan dan perlakuan yang sama di mata hukum. Sehingga pluralisme sebagai suatu kekayaan pada Negara Indonesia hanya terjadi sebagai batasan-batasan kognitif semata.

Jika pluralisme tidak berdampak provokatif maka prinsip kemajemukan akan diapandang sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga, dipelihara tanpa realitas intimidasi dari siapapun di negeri ini, sebagaimana kehidupan kemajemukan di Kabupaten Jayapura. Sesungguhnya masyarakat yang sadar adanya kemajemukan akan memandang kehidupannya di sekitar perbedaan sebagai anugerah Tuhan Maha Kuasa yang harus disyukuri dengan hormat, santun, toleran, kritis dan manusiawi. Karena secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikannya masing-masing (Kuswanjono, 2006). Dan sekalipun masyarakat Kabupaten Jayapura merupakan masyarakat *plural societies* dan sangat dipengaruhi *natural increase* dan juga terutama *immigration* tetapi realitas pluralisme semakin

mewujudnyatakan dengan cara pandang yang positif dan optimistik menjunjung yang kesetaraan untuk membangun kebaikan bersama (*common good*) menuju Papua tanah damai.

Konteks keberagaman di Kabupaten Jayapura telah diwujudkannyatakan sejak berdirinya negeri ini yang bertujuan *pertama* menciptakan kebhinekaan sebagai identitas bangsa dan juga jati diri masyarakat Papua yang multicultural sehingga dapat membangun kehidupan bersama dengan perbedaan dalam upaya mewujudkan kebaikan bersama (*common good*) atas perlindungan, berkat Tuhan Yang Maha Kuasa. *Kedua*, untuk mewujudkan ikrar semboyan bumi Kenambai Umbai Reimay yang artinya satu utuh berkarya meraih kejayaan, keamanan, kedamaian serta maju untuk kemuliaan nama Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam segala situasi kehidupan, kebersamaan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan bersama.

Suatu studi yang berusaha meningkatkan sikap nasionalisme dan menentang radikalisme dengan cara memuat pendidikan multikultural dalam kurikulum sebagai wadah penanaman sikap, toleransi dan kerukunan (Prakasah et al., 2021). Tujuan dari studi ini adalah memandang pentingnya pendidikan multikultural untuk menciptakan masyarakat yang damai dan bermoral. Hasil yang diperoleh dari studi ini adalah karakter nasionalisme dapat dimuat dalam pendidikan multikultural yang dapat diajarkan setiap hari, sedangkan radikalisme sebagai masalah dapat disikapi sebagai suatu tantangan untuk menanamkan nilai pluralisme. Program pendidikan multikultural yang bernilai kebagsaan dapat dimaut dengan berdasarkan penyesauain konten pembelajaran,

penyesuaian pengetahuan, mengurangi prasangka buruk, kesetaraan pedagogi, dan membiasakan sikap toleransi di sekolah sebagai suatu budaya sekolah.

Sejalan dengan studi di atas, Mukhibat menyusun studi cara memutus mata rantai radikalisme dan teroris melalui studi etnopedagogik di PTNU. Tujuan penelitian ini adalah memebrikan deskripsi cara memutuskan radikalisme dan teroris dengan kajian etnopedagogik. Hasil yang dicapai dalam kajian ini adalah etonopedagogik merupakan kontekstualisasi ajaran islam yang mengubah politik kesalehan yang eksklusif menjadi politik kesalahan yang inklusif. Sehingga diperlukan reformasi kurikulum sehingga produksi kesalehan yang inklusif berbasis sosial, budaya, dan lingkungan yang responsif dengan masalah-masalah kemanusiaan (Mukhibat, 2015).

Setelah memahami arti radikalisme yang selalu bersifat destruktif dan bahkan memberikan pengalaman yang traumatik pada sebagian orang. Suatu studi yang mememuat tentang tujuan bagaimana pandangan masyarakat tentang radikalisme di Indonesia (Boniran & Diono, 2022). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya memahami radikalism sebagai sesuatu hal yang kontras dengan rasa aman. Sehingga radikalisme digambarkan sebagai suatu tindakan yang berakar dari terorisme. Hal ini muncul karena adanya ketidak sesuai paham dalam hal kebijakan politik, pemerintah terutama dalam hal pengurusan keagamaan. Selain itu terorisme digambarkan dalam dua aktivitas yaitu melakukan agresifitas dan yang menyebarkan terror sehingga mengusik kenyamanan masyarakat.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat sangat berdampak dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi

komunikasi dan informasi tidak terlepas dari dampak yang positif dan negatif. Sehingga perlunya mejaga moralitas remaja sebagai penerus cita-cita bangsa supaya tidak terjaring kedalam jaringan radikalisme (Lubis & Siregar, 2020). Studi ini berupaya memberikan suatu didikan berupa gambaran emipiris terhadap fenomena secara mendalam, terperinci, dan menyeluruh kepada remaja. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa peran yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa yang luhur akan mengambil bagian dalam/melalui teknologi komunikasi dan informasi. Hoax dan ujaran kebencian adalah contoh-contoh yang bisa mengubah karakter, moral remaja sehingga bisa mengubah cara pandang mereka tentang hidup dalam kemajemukan. Oleh sebab itu pentingnya pendekatan psikologis dilakukan untuk menjaga moralitas remaja supaya terhindar dari paham radikalisme.

Tidak tertutup kemungkinan bahwa yang sangat menonjol dari pluralisme di Indonesia adalah Pluralisme agama. Pluralisme pada agama seharusnya didasarkan pada refleksi teologis yang akan memberikan efek kerukunan umat beragama. Pada awalnya secara kognitif pluralisme beragama hanya sebatas kebebasan memeluk agama dan beribadah serta mencari hakekat kebenaran. Hal ini yang dikawatirkan oleh (Noer, 2019) bahwa secara kognitif ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan di tengah keaneka ragaman. Noer memaparkan bahwa cara yang tepat untuk menghadapi pluralisme beragama adalah melalui pendidikan yang moderat bahwa beragama yang benar adalah beragama yang bersikap inklusif, perlu menerima perbedaan, dan bersikap terbuka. Tujuannya adalah untuk mematahkan

stagnasi pengetahuan atau pemahaman yang sempit tentang bersikap dalam beragama.

Hal yang senada juga dianalisa oleh (Hanik, 2014) yang mengatakan bahwa pluralisme dapat dibedakan secara defenitif secara sosial dan teologia. Pluralisme secara sosial dapat didefenisikan sebagai suatu perbedaan secara umum namun secara teologi pluralisme adalah suatu keterbukaan yang bersifat transparansi, wajar dan tidak bisa dipungkiri, kritis terhadap paham eksklusif, berupa persamaan, dan pengakuan terhadap agama lain sebagai suatu yang benar menurut tata cara mereka.

Di lain sisi bahwa pengaruh globalisasi terhadap pluralisasi yang ditinjau secara menyeluruh di Sumatera barat memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan sosial masyarakat. Effendi berusaha melihat kearifan lokal sebagai solusi dan penguatan terhadap perubahan sosial dalam kemajemukan akibat pengaruh globalisasi. Dia berpendapat bahwa perubahan sosial membawa dampak berupa krisis identitas dan krisis karakter sosial. Sehingga alternatif pemecahan dapat menggunakan kearifan lokal kedaerahan. Salah satu kearifan lokal yang efektif menjalain komunikasi dan perilaku yang harmonis dalam masyarakat Minangkabau adalah dengan pepatah dan petitih serta adagium yang mengatur tingkah laku secara sosial (Effendi, 2015).

Sebagai wilayah yang majemuk yang terdiri dari berbagai etnis, ras, dan agama, Kabupaten Jayapura tetap melandaskan paham mereka pada motto yaitu bersama membangun Papua. Berdasarkan titik tolak motto dan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi sikap modeling pluralisme yang diberlakukan di Kabupaten Jayapura

sebagai suatu motto yaitu bersama membangun Papua (Kabupaten Jayapura) menjadi tanah yang damai. Karena hingga saat ini, kehidupan yang harmonis, damai, nyaman masih dirasakan di kabupaten Jayapura. Sehingga dapat dikatakan bahwa model menyikapi pluralisme dapat dicontoh dari Jayapura sebagai wujud membangun Papua yang aman dan damai. Sikap yang dijadikan tujuan utama dalam penelitian ini adalah membangun mindset masyarakat mengenai masyarakat yang majemuk yang diaktualisasikan atau diwujudkan dalam bentuk pendidikan. Jadi Elaborasi pertanyaan yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan model penanaman sikap kognitif kepada masyarakat Kabupaten Jayapura dalam menghadapi pluralisme?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini berusaha mendeskripsikan fenomena nyata yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2013), yaitu bentuk dan strategi untuk menjaga kerukunan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kajian pustaka yaitu berupa buku-buku dan jurnal aktual terkait fenomena kemajemukan yang ada di Indonesia dan hasil dari wawancara dan observasi dengan Pemangku-pemangku adat, pihak pemerintah lokal dan pemerintah resmi. Tokoh-tokoh Agama, kaum akademisi seperti guru dan dosen, dan masyarakat dari berbagai suku seperti masyarakat lokal Papua, Jawa, Sulawesi, Sumatra, Kalimantan, Maluku, dan NTT. Jumlah Informan dalam penelitian ini adalah 15 yang terdiri dari 1 tokoh adat, 1 pemerintah lokal yaitu Ondoafi, 1 pemerintah resmi

yaitu kepala lurah, 3 tokoh agama (Kristen, Katolik, dan Islam), 1 guru, 1 dosen, 6 perwakilan masyarakat masing-masing dari Jawa, Sumatra, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, NTT, dan 1 perwakilan masyarakat Sentani/Jayapura. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data adalah melalui teknik observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terfokus (yaitu wawancara yang didasarkan pada pertanyaan yang sudah diformulasikan sebelumnya (Wenda et al., 2022)) kepada 15 informan. Observasi dilakukan di berbagai tempat umum seperti di tempat ibadah, pasar, kantor, dan kampus/sekolah. Untuk menganalisa data, data wawancara dikelolah dengan teknik salin dan reduksi kemudian memberikan kesimpulan terhadap masing-masing inti dari pertanyaan. Kemudian hasil kesimpulan wawancara tersebut disandingkan dengan hasil observasi di lapangan untuk menampilkan suatu kesimpulan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada data dari wawancara dan observasi bahwa model mindset yang diterapkan masyarakat Kabupaten Jayapura khususnya di Sentani adalah model yang mengedepankan ranah kognitif yaitu tingkat pemahaman yang inklusif mengenai pendidikan “kemajemukan” yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan Hadi (2001) dalam (Harianto, 2017) bahwa kemajemukan bukanlah menjadi suatu masalah namun kemajemukan adalah nilai tambah dalam masyarakat di mana masyarakat bisa membangun integrasi dari perbedaan yang ada. Jadi cara menyikapi kemajemukan termasuk

menanamkan nilai-nilai pancasila yang inklusif adalah hal yang fundamental dalam bermasyarakat yang mejemuk.

Secara umum masyarakat sudah memahami pluralisme/kemajemukan merupakan identitas bangsa, anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus disyukuri dengan hormat, santun, toleran, kritis dan manusiawi. Dari 15 informan di atas sudah memberikan gambaran mengenai model membangun Kabupaten Jayapura yang damai dan maju. Kondisi objektif ini menciptakan cara berpikir (*mindset*) yang moderat. Hasil pikiran moderat tersebut dituang dalam bentuk pikiran mensikapi kemajemukan melalui pendidikan formal dan in-formal.

Pendidikan Formal

Pendidikan formal yang sudah terbangun dan terus dikembangkan adalah pendidikan formal yang meliputi pendidikan yang di dalamnya diatur oleh kurikulum mulai dari pendidikan dasar sampai pada perguruan tinggi. Pendidikan Formal dalam lembaga pendidikan merupakan jendela untuk mengkaji dan menganalisis dunia di sekitarnya. Tugas mencerdaskan anak-anak bangsa dilakukan para pendidik bertujuan *pertama* mendidik, membimbingnya dengan baik dari segi pengetahuan (*kognitif*), sikap (*afektif*) maupun keterampilan (*psikomotorik*) untuk meraih keberhasilan di masa depan. *Kedua* pendidikan karakter juga tidak kalah pentingnya agar kelak dapat membangun kehidupan bersama di negara yang pluralis dan bertanggungjawab menjaga, memelihara kesatuan negara republik Indonesia (NKRI) yang memiliki perbedaan-perbedaan yang unik sebagai identitas, jatidiri bangsa dan mempertahankan kesatuan negaranya (Hikam, 2018).

Hasil wawancara dengan kaum akademisi yaitu kepala sekolah dan

dosen menunjukkan bahwa dari pendidikan formal dapat membentuk suatu strategi atau rekomendasi bahwa kemajemukan bisa dijadikan muatan kurikulum

“...sikap menjaga dan melakukan sudah menjadi peran pendidik. Di sekolah kami sudah ada mata pelajaran kontekstual mengenai kemajemukan...”

“...Memasukkan ke dalam kurikulum mengenai subjek kemajemukan atau moderasi beragama dll...”

Melalui pendidikan berbasis kurikulum yang telah ditentukan setiap anak didik untuk menghargai kemajemukan yang terlihat di sekitar kebersamaannya dengan orang lain di sekitarnya. Muatan-muatan pembelajaran dapat dilakukan secara inklusif dan memberikan pandangan mengenai dampak-dampak dari pluralisme. Melalui itu sikap kedewasan berpikir peserta mengenai nilai-nilai kemajemukan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Rozi berpendapat bahwa jika pluralisme dan multikulturalisme dapat diaktualisasikan setiap hari maka Indonesia akan menjadi seperti negeri “Saba” yaitu negeri yang madani dalam istilah “*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*” yaitu negeri yang subur dan masyarakatnya penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhannya (Rozi, 2017).

Sikap yang ditanamkan dalam pendidikan formal adalah menghargai perbedaan sebagai suatu kekuatan. Perbedaan dapat dihargai dengan sikap toleransi yang tinggi antar agama, dan budaya, Menghormati perbedaan sukubangsa-etnis, ras, budaya, bahasa dan agama yang ada, bersikap terbuka terhadap perbedaan yang ada, tidak memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain dan mengakui jika setiap kelompok masyarakat memiliki kedudukan yang sama dan tidak boleh

ada bentuk dominasi terhadap kelompok minoritas. Aktualisasi yang dilakukan berupa saling membantu tanpa memperhatikan perbedaan yang ada untuk mewujudkan negeri yang damai bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara di bawah ini.

“...banyak cara bisa diaktualisasikan dalam membentuk sikap mengenai kemajemukan... melalui pendidikan secara formal maupun informal dapat dibentuk sikap yang nasionalis, cinta damai...”
(kaum akademisi)

“...pengamatan saya di gereja bahwa keharmonisan tetap terjaga, kerjasama dalam organisasi gereja tetap solid, saling menghargai dan tidak terjadi pengkotak-kotakan...”
(tokoh agama)

Sikap yang terbentuk di atas adalah sikap dapat dikategorikan bahwa merawat kemajemukan senada dengan merawat Indonesia (Saihu, 2019). Jayapura berkembang dari suatu keadaan yang majemuk. Oleh sebab itu, Tanggung jawab bersama untuk saling menghargai dan bahu membahu membangun Jayapura.

Pendidikan Non-formal

Keluarga sebagai bagian terkecil dalam masyarakat Indonesia tidak lepas dari mengenai kebhinekaan. Oleh sebab itu keluarga harus memperkenalkan pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika. Jika keadaan demikian seharusnya terjadi maka keluarga menjadi titik awal pendidikan pluralisme untuk generasinya, supaya setiap anggota keluarganya dibekali dengan nilai-nilai kehidupan di tengah perbedaan (Andarwati, 2017). Pendidikan pluralism dalam keluarga dapat

menjadikan generasinya selalu berpikir positif memaknai perbedaan sebagai identitas, jati dirinya agar tidak mudah terprovokasi dengan keadaan di luar diri dan negerinya yang berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial.

Nilai kemajemukan dapat diterapkan dengan efektif jika masyarakat dibebaskan dari bahaya tumbuh dan berkembangnya politisasi dan ideologisasi terhadap agama, sukubangsa-etnis, ras, yang kapansaja menimbulkan diskriminasi dan raisime. Jika politisasi dan ideologisasi agama terjadi, maka agama-agama akan mengalami disfungsi di dalam masyarakat bahkan mungkin saja ia bisa menjadi potensi yang destruktif bagi manusia, masyarakat dan bangsa sendiri. Pengaruh pikiran yang destruktif seperti ini hakikatnya mendatangkan ancaman dalam kemajemukan bangsa yang menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika, misalnya adanya hate speech, hoax, radikalisme, rasisme, dan ancaman lainnya yang dapat memecah belah kesatuan masyarakat dan negara Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu wadah yang cukup penting menangkal kekwatiran itu adalah adanya pendidikan non-formal yang menopang sikap kepehaman/kognitif masyarakat.

Pendidikan Organisasi Keagamaan

Membangun sebuah komunitas antar umat beragama untuk menciptakan kehidupan yang rukun, damai tanpa perbedaan yang berdampingan dengan sesamanya dan telah terealisasi dalam komitmen bersama masyarakat Kabupaten Jayapura. Pendidikan organisasi keagamaan dikontrol dengan ketat oleh pemerintah daerah dan bekerjasama dengan masyarakat untuk mengawasi edukasi keagamaan dilakukan. Selain itu moderasi beragama tidak hanya

ditanamkan secara kognitif di sekolah dan di kampus namun aktualisasinya dilakukan langsung dalam masyarakat.

Forum Kerukunan Umat beragama adalah wadah untuk memupuk kebersamaan. Dialog interkatif antar umat beragama diaktifkan sehingga sikap untuk arah eksklusif dihapuskan dalam benak umat namun sikap yang inklusif untuk menciptakan harmonisasi dalam bidang keagamaan.

"...peran tokoh-tokoh agama untuk mengedukasi supaya semua jalan sesuai dengan prinsip Pancasila bahwa "Ketuhanan Yang Maha Esa", Kemanusiaan, persatuan, Kerakyatan, dan keadilan sosial nampak... supaya Senatni Selalu damai dan dalam lindungan Allah SWT..." (tokoh Agama)

"...Kita perlu ibadah kalau yang kristen dan katolik ke gereja setiap hari minggu dan ada juga ibadah keluarga, kalau yang islam pergi mesjid. Tidak usah saling ganggu..." (pemerintah lokal/adat Papua-Sentani)

Harapan dari tuan rumah (tokoh adat) bahwa siapapaun yang ada di Jayapura mempunyai tanggung jawab untuk menata dan menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Kesadaran akan munculnya perpecahan sangatlah sensitive dengan keadaan yang majemuk. Untuk meresponi ungakapan tersebut pemerintah telah menetapkan zona integritas kerukunan beragama di Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, pemerintah provinsi Papua yaitu Wakil Gubernur Papua, Bupati Kabupaten Jayapura, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Sebagaimana juga melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006

menerangkan jika Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) didirikan untuk membangun, memelihara, serta memberdayakan umat beragama guna kerukunan serta kesejahteraan NKRI. Sejalan dengan peraturan bersama, pendidikan kebhinekaan juga dilaksanakan dengan sosialisai empat pilar MPR RI yaitu, Pancasila selaku dasar, Pancasila selaku ideologi negara, UUD NKRI 1945 selaku konstitusi negara, dan Bhineka tunggal Ika adalah semboyan NKRI.

Pentingnya pendidikan kebhinekaan dikuatkan oleh gejala mulai luntarnya makna kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat. Diskriminasi karena SARA, konflik sosial karena perbedaan individu atau kelompok, dan egoisme karena kepentingan pribadi dan golongan adalah jamur yang mulai muncul. Berkaitan dengan hal tersebut, Renstra Kemedikbud 2015-2019 menegaskan urgensi pendidikan kebhinekaan melalui pendidikan kewarganegaraan di lembaga pendidikan untuk memupuk jiwa nasionalis, memperkuat nilai-nilai toleransi, keterbukaan dan penerimaan, mengembangkan pengakuan terhadap keberagaman sosial-budaya, meningkatkan pengetahuan serta wawasan mengenai hak-hak sipil dan kewarganegaraan, serta kewajiban, tanggung jawab dan komitmen jadi warga negara yang baik (Sutrisno, 2019), dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan dasar yang sangat teguh dan kukuh bagi pembangunan kehidupan beragama.

Lembaga Adat

Kehidupan bersama masyarakat yang multikulturalis, kelembagaan adat mempunyai peranan penting untuk menyatukan perbedaan dalam nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang

dapat menciptakan kesatuan untuk mewujudkan kesetaraan, keselarasan, kehidupan berbela rasadi tanah yang damai ini. Lembaga adat menyatukan perbedaan dalam nilai-nilai kebersamaan yang kontekstual sehingga seluruh masyarakat menjunjung tinggi nilai kebersamaan yang kontekstualisasi budaya yang dijunjung bersama. Dewi dan Fatmariza berpendapat bahwa banyak nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa dan membangun negeri seperti nilai-nilai kepemimpinan, nilai partisipasi masyarakat, nilai ekonomi, nilai kesamaan hak dan gender (Dewi & Fatmariza, 2020).

Kegiatan-kegiatan yang berbasis lokal dilakukan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang dijunjung sejak berabad-abad dan salah satunya adalah Kongres Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara yang dilakukan di Kabupaten Jayapura Papua 24 sampai 30 Oktober 2022 yang dihadiri perwakilan masyarakat adat di Nusantara dengan sorotan tema “Bersatu Pulihkan Kedaulatan Masyarakat Adat untuk Menjaga Identitas Kebangsaan Indonesia yang Beragam dan Tangguh Menghadapi Krisis”. Kongres Masyarakat Adat Nusantara ini diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan menjadi proses pengambilan keputusan strategis tertinggi dimana masyarakat adat melakukan musyawarah dalam merumuskan sikap dan pandangan masyarakat adat, mengkonsolidasikan gerakan masyarakat adat, melakukan dialog, serta merumuskan menetapkan mekanisme organisasi.

Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang diselenggarakan di wilayah adat Tabi Papua. Sesuai dengan tema “Bersatu Pulihkan Kedaulatan Masyarakat Adat untuk Menjaga Identitas Kebangsaan Indonesia yang

Beragam dan Tangguh Menghadapi Krisis”, maka pemulihan menjadi kata kunci yang menegaskan persoalan masyarakat adat, sementara kedaulatan menjadi pengikat atas melekatnya hak masyarakat adat yang sekaligus menjadi syarat bagi Indonesia untuk merawat keberagaman dan ketangguhan menghadapi krisis apapun.

Motto Masyarakat Jayapura

Kenyataan pluralisme dalam masyarakat dimulai dari membangun sikap saling menerima satu sama lainnya, agar terwujudnya visi dan misi negeri ini. “Kenambai Umbai Reimay” menjadi jati diri dan integritas bumi Jayapura. “Kenambai umbai Reimay” diartikan satu utuh berkarya meraih kejayaan, keamanan, kedamaian serta maju untuk kemuliaan nama Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam segala situasi kehidupan, kebersamaan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan bersama. Filosofi “*Kenambaiumbai Reimay*” memberikan pengajaran dan didikan untuk berkarya dalam perbedaan yang menyatukan kepentingan bersama di tanah ini. Sejalan dengan nilai filosofis tersebut Muslich berpendapat bahwa pendidikan yang berkarakter dapat membangun integritas bangsa dan bertahan dari gempuran budaya luar yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa (Muslich, 2018).

Pluralisme yang menjadi fakta kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, tetap dijaga dengan sikap yang toleran dan bermartabat di mata dunia. Karena menolak pluralisme berarti sama saja menolak prinsip dasar bangsa ini. Bangsa yang menolak prinsipnya sendiri berarti cepat lambat akan runtuh. Tidak boleh sampai terjadi ada kelompok masyarakat atau kelompok agama atau kelompok etnis

atau kelompok budaya yang merasa dipinggirkan atau terpinggirkan dalam kenyataan hidup bermasyarakat. Pluralisme atau kemajemukan seyogianya dipandang dan diterima sebagai kekayaan bangsa sekaligus merupakan Rahmat Tuhan yang besar untuk dunia dan umat Nya. Selain itu diperlukan sikap yang positif, terbuka dan optimis. Untuk itu pula diperlukan tingkat intelektualitas yang memadai dari seluruh pemimpin di negeri ini. Sebaliknya, sikap emosional apalagi reaktif tidak akan mampu memandang perbedaan dengan lebih hormat, santun, toleran yang manusiawi untuk sebuah adagium Bhineka Tunggal Ika yang telah diwujudkan dalam kemajemukan kehidupan di tanah Papua menuju perwujudan Papua tanah damai (*land of peace*) untuk kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa.

SIMPULAN

Pluralisme di Kabupaten Jayapura Papua telah nampak secara nyata. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah telah membawa hasil yang positif sehingga sampai sekarang ini nilai nilai pluralisme yang berprinsip dapat diterapkan dengan baik. Usaha masyarakat dapat dilihat dari kontribusi positif terhadap penanaman sikap secara kongnitif melalui pendidikan formal dan non-formal. Pengawasan Pendidikan formal yaitu pengajaran mata ajar/kuliah berupa muatan pluralitas (sekolah) dan aplikasi mata kuliah moderasi beragama pada jenjang kuliah. Peran aktif masyarakat didukung oleh berbagai pihak seperti peran pemangku adat, pemerintah, kaum akademisi, tokoh agama, dan masyarakat dari berbagai kalangan dan golongan. Selain itu nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal dan motto masyarakat Jayapura menjadi

komando pelaksanaan nilai-nilai pluralisme. Berdasarkan itu dapat kita saksikan bahwa komando pluralisme tersebut mewujudkan Jayapura sebagai tanah yang damai (*land of peace*) untuk kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana dibangun dalam upaya mewujudkan kebaikan bersama (*common good*) ke arah falsafah bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarwati, M. (2017). Memperkuat Karakter Bhineka Tunggal Ika Melalui Pembelajaran Sejarah di Kelas. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 11(2), 174–179. <https://doi.org/10.17977/um020v11i22017p174>
- Arifianto, Y. A., Fernando, A., & Triposa, R. (2021). Sosiologi Pluralisme dalam Pendidikan Agama Kristen: Upaya Membangun Kesatuan Bangsa. *Jurnal Shanan*, 5(2), 95–110. <https://doi.org/10.33541/shanan.v5i2.3294>
- Boniran, & Diono, W. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Radikalisme. *Jurnal Manjusri*, 1(2), 73–79. <https://stabmahaprajna.ejournal.id/JM/article/view/12>
- Dewi, F. A., & Fatmariza, F. (2020). Reaktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Nagari. *Journal of Civic Education*, 3(3), 243–249. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.394>
- Dzakie. (2014). Meluruskan Pemahaman Pluralisme Agama di Indonesia. *Al-Adyan*, 9(1), 79–94. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v9i1.1408>
- Effendi, N.-. (2015). Kearifan Lokal Menuju Penguatan Karakter Sosial: Suatu Tantangan Dari Kemajemukan Budaya Di Sumatera Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 16(2), 107. <https://doi.org/10.25077/jantro.v16.n2.p107-115.2014>
- Hanik, U. (2014). Pluralisme Agama di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(1), 44–63. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.154>
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu, M. M. (2020). *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. PM Publisher.
- Harianto, S. (2017). *Integrasi Nasional Dalam Pusaran Globalisasi*. https://www.academia.edu/download/48271039/INTEGRASI_NASIONAL_DALAM_PUSARAN_GLOBALISASI.pdf
- Hikam, M. A. S. (2018). Pendidikan Multikultural dalam Rangka Memperkuat Kewaspadaan Nasional Menghadapi Ancaman Radikalisme di Indonesia. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 17(1), 1–17. <https://doi.org/10.7454/global.v17i1.26>
- Kabanga, L., & Paramma, P. (2021). Sikap Tenaga Pendidik dalam Menjalankan Kebijakan “WFH” di Kota Jayapura. *Jendela*, 9(1), 70–82. <https://ojs.ustj.ac.id/jendela/article/view/898>
- Kuswanjono, A. (2006). Pluralisme Pancasila. *Jurnal Filsafat*, 16(1), 77–93. <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/viewFile/23217/15308>
- Lubis, D., & Siregar, H. S. (2020). Bahaya Radikalisme terhadap Moralitas Remaja melalui Teknologi Informasi (Media Sosial). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 20(1), 21–34. <https://doi.org/10.14421/aplikasia>

- v20i1.2360
- Masykur, S. (2016). Pluralisme dalam Konteks Studi Agama-Agama. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 8(1), 61–77. <https://doi.org/10.24014/trs.v8i1.2471>
- Mukhibat, M. (2015). Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme Berbasis Studi Etnopedagogi di PTNU dalam Membentuk Keberagaman Inklusif dan Pluralis. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 222–247. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=616124&val=6922&title=Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme Berbasis Studi Etnopedagogi di PTNU dalam Membentuk Keberagaman Inklusif dan Pluralis](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=616124&val=6922&title=Memutus+Mata+Rantai+Radikalisme+dan+Terorisme+Berbasis+Studi+Etnopedagogi+di+PTNU+dalam+Membentuk+Keberagaman+Inklusif+dan+Pluralis)
- Muslich, A. (2018). Nilai-Nilai Filosofis Masyarakat Jawa Dalam Konteks Pendidikan Karakter Di Era Milenial. *AL-ASASIYYA: Journal Of Basic Education*, 2(2), 65–78. <https://doi.org/10.24269/ajbe.v2i2.1119>
- Noer, A. (2019). Pluralisme Agama Dalam Konteks Keislaman Di Indonesia. *Religi Jurnal Studi Agama-Agama*, 15(1), 51. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2019.1501-04>
- Prakasah, R. C., Firman, F., & Rusdinal, R. (2021). Nilai Nasionalisme dan Anti Radikalisme dalam Pendidikan Multikultural. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(2), 294–303. <https://doi.org/10.36418/japendi.v2i2.103>
- Rozi, M. F. (2017). Pluralisme dan Multikulturalisme Dalam Membangun Masyarakat Madani; Kajian Paradigmatik. *Al-Ibrah*, 2(2), 104–127. <http://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/32/27>
- Saihu, M. (2019). *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan Pluralisme Agama Di Jembrana-Bali)*. Deepublish.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323–348. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>
- Wenda, D., Kabanga, L., & Labobar, M. W. (2022). Fungsi Bahasa pada Konten Khotbah Pengkhotbah di Jemaat-Jemaat Lingkungan Kota Klasis Sentani. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 5(4), 793–806. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i4.483>